

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arab Saudi secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau *Kingdom of Saudi Arabia* yang dikenal dengan sistem monarki absolut di kawasan Timur Tengah. Kerajaan Arab Saudi berasal dari Dinasti Saud yang telah ada sejak abad ke- 18 di daerah Najd yang terletak di bagian tengah semenanjung Arab. Dinasti Saud didirikan oleh tokoh yang bernama Amir Muhammad bin Sa'ud (1703-1792). Kerajaan Arab Saudi dikuasai oleh keluarga Al-Saud yang berpijak pada ideologi mazhab Wahabi yang kemudian menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah Keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab.

Kerajaan Arab Saudi meskipun mengadopsi sistem monarki absolut, ia tidak menutup diri dari panggung internasional. Dibuktikan dengan adanya keterlibatan aktif Arab Saudi dalam sejumlah organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), OKI (Organisasi Konferensi Islam), Liga Arab, IIRO (*International Islamic Relief Organization*), GCC (*Gulf Cooperation Council*) dan OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) (Yasinta, 2019).

Tidak hanya di panggung Organisasi Internasional, Arab Saudi juga terlibat sejumlah kerjasama dengan beberapa Negara diluar kawasan salah satunya adalah Kanada. Hubungan bilateral kedua Negara mencakup kepentingan bersama di beberapa bidang seperti masalah perdamaian dan keamanan, termasuk keamanan energi, urusan kemanusiaan (termasuk pengungsi) dan kontra – terorisme, pendidikan, dan perdagangan. Pemerintah Saudi memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional maupun internasional. Arab Saudi juga dianggap sebagai pemimpin dunia Arab dan Muslim serta Penjaga Dua Masjid Suci (Mekah dan Madinah). Setiap tahun ribuan orang Kanada termasuk di antara

sekitar dua juta Muslim yang melakukan haji tahunan, atau ziarah ke Mekah. Dalam bidang pendidikan ada lebih dari 15.000 siswa Saudi di Kanada, termasuk 800 dokter dan spesialis yang menetap disana, mereka juga ikut memberikan perawatan kepada penduduk Kanada. Di bidang perdagangan, Arab Saudi merupakan pasar ekspor terbesar kedua Kanada di wilayah tersebut (Government of Canada, 2016).

Hubungan Diplomatik Arab Saudi – Kanada terajut dan menapak cukup baik seiring berjalannya waktu. Arab Saudi merupakan Negara yang memimpin wilayah Teluk di Timur Tengah. Perang teluk yang terjadi awal tahun 1990-an adalah perjuangan yang sangat terkenal bagi banyak negara terutama Arab Saudi itu sendiri. Keadaan tersebut membuat Kanada terpenggil untuk membantu dan menawarkan diri untuk turun ke medan perang. Ada lebih dari 4.000 anggota Angkatan Bersenjata Kanada yang bertugas mengamankan wilayah Teluk Persia sebagai bagian dari 35 negara koalisi multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat agar bersatu mengusir pasukan penjajah Irak untuk segera keluar dari Kuwait. Berfungsi dibawah naungan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah menyetujui negara-negara tersebut termasuk Kanada untuk menggunakan kekuatan (Veteran Affairs Canada, 2019).

Kerjasama ekonomi kedua negara juga berjalan sangat progresif. Arab Saudi mempercayakan Kanada sebagai mitra dagang persenjataannya. Arab Saudi menyepakati kesepakatan jual-beli senjata dengan Kanada dan akan membeli ratusan kendaraan tempur lapis baja dari perusahaan senjata Kanada *General Dynamics Corp* senilai USD 13 miliar atau lebih dari 187 triliun pada tahun 2014 (CNN Indonesia, 2018). Dalam hal ini Kanada masih mempertimbangkan terkait penjualan senjata kepada pihak Arab Saudi dikarenakan Kanada memberlakukan sejumlah regulasi terkait penjualan senjata dan alat pertahanan militernya. Didalam kontrak kesepakatan juga tercantum salah satu klausul yang mengharuskan negara pembeli alutsista Kanada terbebas dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) sehingga Kanada masih harus mempertimbangkan,

meneliti dan membuktikan bahwa Arab Saudi yang memang terbebas dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) (CNN Indonesia, 2018).

Dalam sebuah hubungan internasional, tidak dapat dihindari bahwa hubungan diplomatik di antara Negara satu dengan Negara lainnya dapat berubah – ubah dan mengalami dinamika mengikuti perkembangan perpolitikan yang ada dalam ranah kawasan maupun Internasional. Begitu pula dengan hubungan mesra antara Arab Saudi dan Kanada, sebuah hubungan diplomatik yang sudah terjalin sejak lama tidak menjamin bahwa hubungan diantara kedua Negara tersebut akan selalu berada di iklim yang harmonis, baik dan mulus.

Pada 6 Agustus 2018, masyarakat Internasional digemparkan dengan kabar pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Kanada yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun twitternya. Arab Saudi juga menyebutkan akan membekukan segala bentuk hubungan bisnis dengan Ottawa. Negara monarki tersebut juga menghentikan seluruh program operasional yang berkaitan dengan dunia medis di seluruh Kanada (Republika, 2018) dan memberi titah agar 8.000 pelajar Saudi yang sedang menimba ilmu di Kanada untuk segera pulang pada 31 Agustus 2018 (Baker, 2018). Kemudian meminta duta besar Kanada di Riyadh angkat kaki dalam waktu 24 jam dan memanggil pulang duta besar Arab Saudi untuk Kanada yang berada di Ottawa (Gulf News, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: **Mengapa Arab Saudi Memutuskan Hubungan Diplomatik terhadap Kanada pada Tahun 2018?**

C. Kerangka Teori

Teori pada dasarnya merupakan bentuk penjelasan yang paling umum dalam menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dan kapan sebuah fenomena diramalakan terjadi. Dengan kata lain teori dapat digunakan sebagai dasar eksplanasi maupun dasar bagi prediksi.

Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan (Masoed, 1990, p. 185). Sehingga untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*Decision Making Theory*) oleh William D. Coplin.

Menurut Coplin Politik Luar Negeri berisi sejumlah aktivitas yang bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kebijakan umum, keputusan – keputusan administratif dan keputusan-keputusan kritis. Politik luar negeri yang bersifat umum terdiri dari atas serangkaian keputusan yang satu sama lain hanya terkait secara tidak langsung.

Politik Luar Negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan – pernyataan politik luar negeri yang bersifat administratif dibuat oleh para pejabat yang lebih rendah menyangkut kondisi – kondisi spesifik yang dibatasi oleh lingkup, ruang, dan waktunya. Selanjutnya, keputusan – keputusan politik luar negeri yang bersifat krisis biasanya menyangkut kondisi – kondisi khusus yang membawa konsekuensi jangka panjang sehingga para pesertanya dapat merasa terancam, terbatas oleh waktu dan mengejutkan (Coplin W. D., 2003, p. 32). Jika dilihat dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kanada merupakan keputusan politik negeri yang bersifat krisis.

Kemudian, teori ini akan menjelaskan secara spesifik faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Negara. Dalam bukunya, William D. Coplin menyatakan :

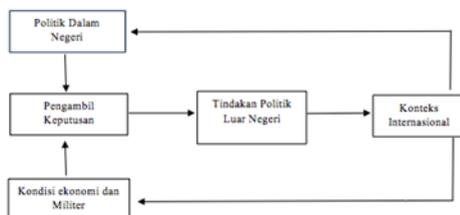
”apabila kita mempertanyakan mengapa Negara berperilaku seperti itu, maka kita harus mempertanyakan mengapa para pemimpin Negara tersebut membuat keputusan seperti itu. Akan tetapi, salah besar apabila kita menganggap bahwa para pengambil keputusan

politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi, sebaliknya, tindakan politik tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga konteks internasional, yaitu posisi khusus Negara dalam hubungan Negara lain dalam konteks itu” (Coplin W. D., 2003, p. 30).

Coplin menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh tiga pertimbangan, yaitu kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks Internasional. Dengan mengamati tiga pertimbangan ini, nantinya dapat menjelaskan alasan politik luar negeri sebuah Negara ditetapkan. Perlu juga untuk digaris bawahi bahwa setiap pertimbangan hanya berpengaruh secara parsial, sehingga tiap pertimbangan bukanlah faktor tunggal terhadap terbentuknya kebijakan luar negeri. Pertimbangan – pertimbangan lain juga mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri tersebut.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai teori ini, William D. Coplin menjelaskan melalui gambar berikut ini (Coplin W. D., 2003) :

Gambar 1.1 Model Proses Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri oleh William D. Coplin



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaahan Teoritis, (Bandung, CV. Sinar Baru, 1992), hal.30

1. Politik Dalam Negeri

Politik domestik membawa dampak besar terhadap politik luar negeri suatu Negara. Perbedaan sistem pemerintahan yang dianut seperti demokratis atau autokrasi, terbuka atau tertutup merupakan keadaan dalam negeri yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Kemudian stabilitas Negara serta kondisi dalam negeri menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Namun perlu diingat bahwa politik dalam Negeri hanyalah seperangkat konsideran yang bekerja dalam perumusan politik luar negeri sebuah Negara (Coplin W. D., 2003, p. 170).

Coplin memfokuskan analisisnya pada hubungan antar para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor dalam Negeri, yang berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Coplin memberikan istilah *policy influencer* bagi yang mempengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menentukan kepentingan nasional, mengatur strategi dan membuat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan. Di beberapa Negara, pemimpin Negara (Presiden, Perdana Menteri, atau Raja) merupakan aktor dominan dalam pengambilan keputusan (Coplin W. D., 2003, p. 74). Ketika dilihat dari sistem pemerintahannya yang authokratik, Raja Arab Saudi memiliki peran yang dominan dalam pengambilan keputusan luar negeri Arab Saudi. Coplin mengkategorikan *policy influencer* menjadi empat kategori yaitu, *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer* (Coplin W. D., 2003, p. 81).

Tipe yang pertama adalah *Bureaucratic influencer*, berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan. Kemudian kelompok-kelompok birokratis menjadi sangat berpengaruh apabila mereka merupakan anggota dari pengambil keputusan. Birokrasi menurut Max Weber merupakan suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang diterapkan secara rasional oleh berbagai macam

peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang (Liputan6, 2019).

Tipe yang kedua adalah *partisan influencer*, mereka bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah.

Tipe yang ketiga adalah *interest influencer*, terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapat dukungan dari pengambil keputusan yang lain.

Tipe yang terakhir adalah *mass influencer*, dalam hal ini mengacu pada iklim opini, yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat penyusunan politik luar negeri. Dampak *mass influencer* bisa beraneka ragan tergantung kepada sistem politik yang dianut suatu Negara(Coplin W. D., 2003, hal. 82-90)

Tipe *bureaucratic influencer* adalah tipe yang paling tepat digunakan dalam menganalisa politik luar negeri Arab Saudi. Dari sisi *bureaucratic influencer* dilihat sejak kerajaan Arab Saudi berdiri tahun 1932 yang dipimpin oleh Raja yang memiliki kekuasaan absolut. Raja berperan sebagai kepala pemerintahan dan perdana menteri oleh sebab itu semua kebijakan baik dalam maupun luar negeri diambil oleh Raja. Walaupun Raja bisa dibidang sebagai aktor tunggal pengambil keputusan, namun Raja tetap saja dipengaruhi oleh keluarga yang ada disekelilingnya, di mana keluarga kerajaan juga mendapat kedudukan yang strategis dalam pemerintahan Arab Saudi. Jadi keluarga kerajaan yang merupakan birokrat yang mempengaruhi secara langsung kebijakan yang dikeluarkan oleh Raja Arab Saudi.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer negaranya dalam membuat kebijakan luar Negeri. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan dan juga kelemahan ekonomi dan militer negaranya ketika hendak menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan juga harus menyeimbangkan komitmen serta kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasan yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer (Coplin W. D., 2003, p. 124).

Ekonomi dan militer merupakan “*power*” sebuah Negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Untuk mengukur kekuatan atau kelemahan ekonomi suatu Negara maka dapat dilihat dari GNP, GNP perkapita dan neraca pembayaran suatu Negara. Dalam mengukur kekuatan dan kelemahan militer suatu Negara dapat dilihat dari kapasitas penggunaan kekuatan militer, tingkat ketergantungan kepada Negara lain dan kestabilan keamanan domestik.

Dengan mempertimbangkan semua faktor yang telah dipaparkan, Coplin membagi Negara menjadi dua kategori yaitu, Negara maju dan Negara terbelakang. Negara maju memiliki GNP yang relatif tinggi, kapasitas produksi yang bervariasi, angkatan senjata konvensional yang terlatih dengan baik, serta aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Sedangkan definisi Negara terbelakang menurut Coplin adalah Negara dengan GNP yang relatif rendah, ekonomi yang bergantung pada Negara lain dan angkatan senjata yang tidak terlatih dengan baik. Faktor pembeda antara Negara maju dan Negara terbelakang inilah yang akan membedakan pengambilan kebijakan luar Negeri suatu Negara.

Jika ditinjau dari aspek kekuatan ekonomi dan militer, maka Arab Saudi dapat dikategorikan sebagai Negara maju dengan kemampuan ekonomi yang stabil serta kekuatan ekonomi yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari GNP perkapita Arab Saudi yang relatif tinggi yaitu sebesar 646,4 miliar USD yang mana ekspor terbesar berasal dari minyak dan gas bumi. Sedangkan dilihat dari sisi

kemampuan militer, anggaran belanja militer Arab Saudi menduduki posisi ketiga yang terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Dengan didukung oleh kekuatan ekonomiyang dimiliki Arab Saudi tersebut lantas membuat kebijakan luar negerinya untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Kanada merupakan keputusan yang dianggap tidak perlu dikhawatirkan sama sekali.

Arab Saudi dilihat dari sisi keamanan dan pertahanan militer, mencatat aktivitas belanja persenjataan oleh Arab Saudi meningkat sebanyak 275% dalam lima tahun terakhir. Dengan dukungan keuangan, kuantitas dan jumlah personel, militer Arab Saudi menjadi salah satu dari banyak negara besar yang paling komplit dari segi fasilitas keamanan dan pertahanan militer. Arab Saudi juga menjadi salah satu negara yang memiliki militer paling kuat di kawasannya dan menobatkan dirinya sebagai negara pembeli senjata terbanyak dan terbesar di dunia (Dayana, 2019).

3. Konteks Internasional

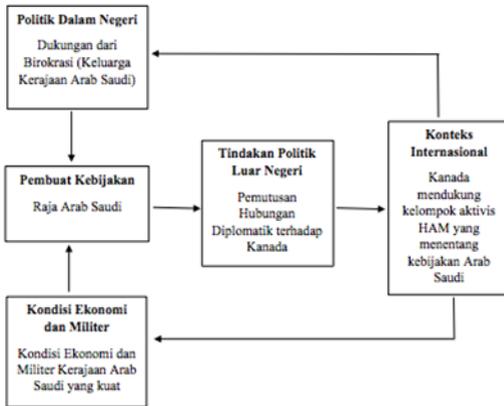
Konteks internasional adalah situasi dimana Negara yang menjadi tujuan politik luar Negeri, serta pengaruh dari Negara-Negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi merupakan konsideran dalam membuat keputusan luar Negeri. Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar Negeri suatu Negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Dalam hal ini, lingkungan internasional setiap Negara berdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan Negara-negara lain dalam sistem itu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara Negara itu dengan Negara lain. Aliansi-aliansi juga bisa berdampak besar terhadap anggotanya dan bukan anggotanya. Terutama apabila aliansi itu menyangkut pasukan-pasukan yang berada di wilayah asing (Coplin W. D., 2003, p. 166).

Arab Saudi dalam kasus ini menganggap bahwasanya dukungan Kanada terhadap para aktivis Hak Asasi Manusia Perempuan yang dianggap melakukan kontak mencurigakan dengan asing atau telah mendapat bantuan dari musuh luar negeri

(Armandhanu, 2018) oleh Arab Saudi dianggap telah melanggar kebijakan serta mengancam kedaulatan negaranya. Arab Saudi juga sangat mengecam kritikan pedas Kanada melalui akun twitternya yang mendesak otoritas Arab Saudi agar segera membebaskan aktivis perempuan yang sedang dipenjara di Arab Saudi. Kritik tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi urusan dalam negeri Kerajaan serta berpotensi mengancam kedaulatan Arab Saudi, sedangkan yang kita tahu Arab Saudi merupakan negara yang selalu ingin mempertahankan kekuasaannya di kawasan Timur Tengah. yang dilakukan oleh Kanada terhadap Arab Saudi dan memerlukan tindakan sangat serius. Di sisi lain Arab Saudi dalam langkahnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Kanada mendapat dukungan internasional mulai dari para sekutu didalam kawasan Timur Tengah maupun diluar Kawasan seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, Palestina dan Rusia serta mendapat dukungan pula dari organisasi regional. Bahrain, Uni Emirat Arab dan Palestina menganggap bahwa Kanada sangat tidak pantas untuk ikut campur kedalam masalah internal Arab Saudi. Amerika Serikat dan Inggris yang dianggap sebagai sekutu terdekat Kanada juga lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam krisis diplomatik ini. Sehingga Arab Saudi masih tetap percaya diri akan keputusan yang telah dijatuhkannya terhadap Kanada (Firman, 2018).

Gambar 1.2 Hubungan antar Konsideran dalam Proses Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri Arab Saudi

berdasarkan Model Pengambilan Kebijakan Luar Negeri oleh William D. Coplin.



D. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori yang digunakan, maka penulis menarik hipotesa bahwa alasan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik terhadap Kanada karena:

1. Keputusan yang telah diambil Raja Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Kanada didukung oleh birokrasi kerajaan yang diduduki pula oleh keluarga kerajaan yang cenderung monolit.
2. Keputusan ini juga didukung oleh pertimbangan ekonomi dan militer Arab Saudi yang terbukti mandiri.
3. Dilihat dari konteks Internasional, Arab Saudi mempunyai persepsi bahwa Kanada telah melakukan intervensi politik terhadap negaranya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, sehingga penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan alasan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Kanada.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain itu, juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data yang penulis kumpulkan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang ditekankan penulis di dalam penelitian ini adalah pada penggunaan batas waktu, yaitu tahun 2014 yang mana merupakan awal terjadinya dinamika hubungan antara Arab Saudi dan Kanada, tepatnya pasca protes yang dilakukan oleh para pegiat HAM di Kanada yang mengkhawatirkan kendaraan perang yang diimpor Kerajaan dari Kanada digunakan untuk Perang Yaman dan melukai warga sipil, sampai dengan keputusan kerajaan Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kanada tahun 2018. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan data rujukan di luar waktu tersebut jika dianggap masih relevan dengan topik penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teoritik, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisi tentang Dinamika Politik Dalam Negeri Arab Saudi yang meliputi Gambaran Umum Kerajaan Arab Saudi, Sistem pemerintahan Arab Saudi, Sistem Politik Arab Saudi dan Haluan Politik Luar Negeri Arab Saudi.

Bab III merupakan bab yang berisi tentang Hubungan Arab Saudi dan Kanada sejak tahun 2014 sampai dengan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Kanada tahun 2018.

Bab IV merupakan bab pembuktian hipotesa yang menjelaskan konsideran – konsideran yang menyebabkan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kanada.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan menyimpulkan keseluruhan isi materi penulisan skripsi ini yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya.